

Kadisdik Jabar Sebut, Vaksinasi Salah Satu Fokus Pemdapro



BANDUNG (IM) - Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Provinsi Jawa Barat sekaligus Ketua Divisi Percepatan Vaksinasi Jabar, Dedi Supandi mengatakan, vaksinasi merupakan salah satu fokus dari Pemda Provinsi Jawa Barat saat ini.

Untuk mempercepat pelaksanaan vaksinasi ini, Pemda Provinsi Jawa Barat melakukan kolaborasi dengan berbagai pihak.

"Tugas hari ini tugas pemerintah itu tiga, penanganan Covid, yang kedua percepatan vaksinasi yang ketiga adalah pemulihan ekonomi nasional. Jadi tiga-tiganya ini harus berjalan maknanya dengan kolaborasi tadi dengan CIMB niaga merupakan bagian dalam rangka mendukung percepatan vaksinasi," kata Dedi.

Hal ini disampaikan Kadisdik ketika meninjau meninjau pelaksanaan vaksinasi massal di SMK Negeri 3 Bandung, Jawa Barat, Kamis (2/9).

Vaksinasi massal ini berkolaborasi dengan CIMB Niaga bersama seluruh jajarannya mendukung terkait program ini termasuk juga didukung oleh TNI Lanud Sulaiman.

Ada beberapa kolaborasi yang akan dilakukan oleh Pemda Provinsi Jabar. Dari mulai dengan pihak perbankan, pelaku industri hingga pengusaha-pengusaha mal untuk menyiapkan sentra vaksinasi. "Terima kasih kita ini vaksinasi kolaborasi yang pertama ada sentra vaksin

di nakes, kedua ada sentra vaksin yang kolaborasi ada terdiri dari di mal juga oleh pihak perbankan salah satunya oleh CIMB Niaga ini, ada juga oleh ikatan alumni ada juga sentra vaksin di desa ada juga sentra vaksin di pusat perekonomian di perbelanjaan," jelasnya.

Presiden Direktur CIMB Niaga Finance, Ristiawan Suherman mengatakan, kegiatan ini bertujuan mendukung program akselerasi vaksinasi Covid-19 pemerintah khususnya Kota Bandung. Sehingga diharapkan herd immunity bisa sesegara mungkin terbentuk.

"Sebetulnya kita menargetkan untuk seluruh swasta untuk ikut berkolaborasi. Karena kita tahu bahwa kondisi di Indonesia atau di dunia bermasalah akibat pandemi Covid-19.

Salah satu caranya untuk keluar dari kondisi sulit bagaimana meminimalisasi paparan virus dengan vaksinasi. Menciptakan imunitas kelompok adalah salah satu cara untuk kita bisa keluar dari permasalahan yang ada," jelasnya.

Ristiawan berharap agar para pelaku usaha lainnya juga bisa ikut serta dalam mendukung program vaksinasi. Sehingga pandemi segera diakhiri dan pemulihan ekonomi juga bisa berjalan. "Bagaimana kita mempercepat imunitas kelompok tersebut bukan tugas pemerintah. Swasta ikut bertanggung jawab salah satu caranya kita berkolaborasi dengan TNI, SMKN 3 Bandung, dari Kementerian Kesehatan dan Pemda Prov.

Mudah-mudahan ini bisa melotivasi seluruh swasta, industri dan lainnya untuk sama-sama mempunyai kesadaran bagaimana kita mempercepat program vaksinasi yang akan berdampak pada pemulihan perekonomian," jelasnya. ● lys

8 | Nusantara



IDN/ANTARA

KEMACETAN DI GERBANG TOL PASTEUR

Sebuah mobil ambulans berusaha keluar dari kemacetan saat menuju gerbang keluar Tol Pasteur di Bandung, Jawa Barat, Jumat (3/9). Kemacetan tersebut terjadi imbas dari pemberlakuan sistem ganjil genap di lima gerbang keluar tol yang menuju ke Kota Bandung.

TIDAK HAPUS ONEWAY PADA AKHIR PEKAN

Ganjil Genap Hanya Berlaku bagi Kendaraan Menuju Puncak

Ganjil genap hanya berlaku bagi kendaraan yang mengarah ke Puncak dan bagi kendaraan yang menginap hari sebelumnya diperbolehkan turun ke Jakarta/Bogor tanpa pemeriksaan.

BOGOR (IM) - Selama tiga hari, mulai Jumat (3/9), Polres Bogor memberlakukan uji coba ganjil genap di Jalur Puncak. Uji coba ganjil genap jalur ini hanya dikhususkan bagi kendaraan yang menuju Puncak.

Kasat Lantas Polres Bogor, AKP Dicky Pranata menuturkan, ganjil genap berlaku bagi kendaraan yang mengarah ke Puncak dan bagi kendaraan yang menginap hari sebelumnya diperbolehkan turun ke Jakarta/Bogor tanpa pemeriksaan.

"Check point kita di sebelah kiri jalan, ruas kanan tidak. Artinya, kendaraan dari arah Puncak tidak ada pemeriksaan," kata Dicky, Jumat (3/9) siang.

AKP Dicky memastikan, bagi tamu yang menginap di kawasan Puncak pada hari sebelumnya dan mengarah ke luar Puncak tidak diperiksa.

Pun demikian, pelancong yang akan berwisata ke kawasan Puncak wajib vaksin. Saat di check point, petugas akan memeriksa sertifikat vaksin dengan menunjukkan melalui aplikasi PeduliLindungi.

"Di semua tempat itu jadi

syarat perjalanan mutlak, jadi kami juga melakukan pemeriksaan vaksin, karena wajib," lanjut Dicky.

Terkait sanksi, Dicky menambahkan pada tiga hari uji coba ini, petugas hanya akan memutarbalikkan kendaraan yang kedapatan tidak sesuai antara tanggal dengan nomor akhir kendaraan.

"Untuk saat ini baru sebatas imbauan, kendaraan yang tidak sesuai aturan ganjil genap hanya diminta putar balik," tambah Dicky.

Tidak Menghapus One Way

Aturan ganjil genap bagi kendaraan yang menuju kawasan wisata Puncak, Kabupaten Bogor tidak serta merta menghapus sistem one way yang diberlakukan pada akhir pekan.

"(Ganjil genap) tidak menghapus sistem oneway saat akhir pekan," kata KBO Satlantas Polres Bogor Iptu Ketut Laswarjana di Pos Polisi Simpang Gadog, Jumat (3/9).

Ketut menambahkan, sistem one way masih bisa diberlakukan secara situasional apabila kondisi memang sangat padat. Tetapi, seyogyanya

jika ganjil genap dilakukan akan ada pengurangan volume kendaraan yang menuju kawasan Puncak.

"Ganjil genap otomatis akan mengurangi kendaraan yang masuk ke Puncak. Tapi kalau memang arusnya masih juga padat, oneway bisa dilakukan," jelasnya.

Termasuk, tambah Ketut, ganjil genap tidak menggantikan pemeriksaan keterangan vaksinasi dan hasil negatif antigen atau PCR seperti sebelumnya. "Masih juga (pemeriksaan antigen dan vaksinasi)," tutup Ketut.

Ratusan Aparat Gabungan Awasi

Sebanyak 300 personel aparat gabungan diterjunkan untuk mengawal pelaksanaan sistem ganjil genap di Jalur Puncak, Cisarua dan Kawasan Sentul.

"Pelaksanaannya sendiri dimulai setelah salat Jumat, dengan estimasi 300 personel gabungan," kata Kepala Satpol PP Kabupaten Bogor, Agus Ridhalla seperti dikutip dari Antara, Jumat (3/9).

Agus menuturkan ratusan personel itu nantinya akan tersebar di beberapa titik pos pemeriksaan yang telah disiapkan.

Adapun tujuh titik pemeriksaan itu yakni pintu Tol Ciawi, Simpang Gadog, Rainbow Hills, pos penutupan arus Cibanon, pos penutupan arus Bandung, dan dua lokasi di Kawasan Sentul.

Kabupaten Karawang Fokus Vaksinasi Sebelum Pembelajaran Tatap Muka



BANDUNG (IM) - Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat mendorong setiap Pemerintah Kota/ Kabupaten untuk menggelar pembelajaran tatap muka agar diterapkan di sekolah dengan memperhatikan protokol kesehatan yang ketat.

Anggota Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat, Sri Rahayu Agustina mengatakan, pembelajaran tatap muka di Kabupaten Karawang belum dapat terlaksana dikarenakan pemerintah setempat sedang gencar mensosialisasikan vaksinasi yang mana keselamatan dan kesehatan adalah yang utama.

"Tadi penjelasan dari pengawas bahwa hampir seluruh sekolah SMA/ SMK sudah siap untuk sekolah tatap muka, akan tetapi sampai hari ini belum ada izin dari ibu Bupati karena mungkin ibu Bupati sedang fokus mengejar target vaksinasi di beberapa Desa/

Kelurahan di Kabupaten Karawang.

Tentu ini hal positif di mana keselamatan dan kesehatan masyarakat di Kabupaten Karawang adalah yang utama," kata Sri saat melakukan kunjungan kerja ke SMA 1 Negeri Karawang, Kamis (2/9).

Sri menyebut, di wilayah Kantor Cabang Dinas IV sudah ada Kabupaten Purwakarta yang sudah melakukan pembelajaran tatap muka dengan catatan 30 sampai 50 persen siswa saja dengan pertimbangan mereka semua sudah di vaksin, berbeda dengan Kabupaten Karawang dan Subang yang masih menunggu kesiapan dari Pemerintah Daerahnya.

"Jadi kalo di KCD Pendidikan IV Kabupaten Purwakarta lebih dulu melakukan pembelajaran tatap muka, jadi tinggal Subang dan Karawang saja yang belum namun diba-

tasi dari 30 sampai 50% saja," ucapnya.

"Kemungkinan pembelajaran tatap muka itu didahulukan yang sudah melakukan vaksinasi, dan juga yang paling penting adanya izin dari orang tua," tambahnya.

Lebih lanjut Sri juga menjelaskan, bahwa kedepannya ada kemungkinan Dinas Pendidikan akan berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan dapat memantau ketertiban angkutan umum.

Karena menurutnya, dikhawatirkan banyak para siswa yang pulang pergi menumpang angkutan umum dengan berdesak-desakan. Sehingga, sangat rentan terjadi penularan Covid-19.

"Tadi kepala sekolah juga mencanangkan adanya kerja sama dengan Dinas Perhubungan, mungkin ini ada solusi dari pemerintah daerah ketika memang sekolah ini harus tatap muka," tutup Sri. ● lys



IDN/ANTARA

UJI COBA PEMBERLAKUAN GANJIL GENAP DI PUNCAK BOGOR

Anggota TNI mengarahkan kendaraan saat penerapan sistem ganjil genap di Jalan Raya Puncak, Gadog, Ciawi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat (3/9). Pemerintah Kabupaten Bogor menerapkan uji coba sistem ganjil genap pada tanggal 3-5 September 2021 bagi kendaraan bermotor di wilayah wisata Puncak.

Hampir 100 Porsen Divaksin, SMKN 2 Kota Cimahi Siap Laksanakan PTM



BANDUNG (IM) - Anggota Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat, Dessy Susilawati dan Rudi Harsa Tanaya melakukan pemantauan pelaksanaan vaksinasi di SMKN 2 Kota Cimahi, terkait persiapan pembelajaran tatap muka.

"Alhamdulillah hari ini komisi V bisa berkunjung ke SMKN 2 Kota Cimahi di mana kami melaksanakan pemantauan pelaksanaan vaksinasi dan rencana pembelajaran tatap muka," kata Dessy kepada wartawan di Kota Cimahi, Jumat, (3/9).

Desy menjelaskan, bahwa kegiatan vaksinasi ini dilakukan kepada para siswa yang belum melakukan vaksinasi. Dirinya melihat setengah dari jumlah siswa yang berada di SMKN 2 Kota Cimahi ini sudah melakukan vaksinasi secara mandiri.

"Alhamdulillah pada hari ini vaksinasi dilaksanakan kepada 650 siswa SMK yang belum vaksinasi sama sekali dengan sebagian siswa yang sudah vaksinasi mandiri karena total siswa yang berada di SMK 2 ini adalah 1700 siswa,

nah yang 600 hari ini memang yang belum di vaksin sama sekali," ucap Dessy.

Dessy menambahkan, untuk pelaksanaan tatap muka di SMKN 2 Cimahi, dirinya melihat kesiapan sekolah untuk melaksanakan tatap muka terbatas sesuai dengan yang telah dianjurkan pemerintah, karena Kota Cimahi sudah masuk PPKM Level 3 jadi bisa untuk melaksanakan PTM terbatas.

"Untuk SMKN 2 alhamdulillah sudah siap dan protokol kesehatan yang dianjurkan oleh satgas Cimahi sudah memenuhi syarat PTM terbatas," ungkapnya.

Siswa-siswi ini, menurut Dessy, nanti setelah pelaksanaan vaksinasi semuanya bisa melakukan pembelajaran tatap muka karena bagaimanapun para siswa dan siswi juga sudah ingin bertemu dengan teman-temannya dan rindu juga untuk bersosialisasi.

"Mudah-mudahan ini ikhtiar kita yaitu vaksinasi semoga pembelajaran tatap muka bisa di lakukan oleh siswa SMA/SMK," pungkasnya. ● lys

Sementara itu, Kapolres Bogor AKBP Harun menuturkan kendaraan yang pelat nomornya tidak sesuai tanggal akan diputarbalikkan oleh petugas di lapangan.

Namun, ada beberapa kendaraan yang dicekualikan. Antara lain, armada pemadam kebakaran, ambulans, tenaga medis, kendaraan dinas TNI-Polri, angkutan umum, angkutan online, serta angkutan logistik.

Disampaikan Harun, penerapan ganjil genap ini dilakukan untuk meminimalisir kepadatan kendaraan di wilayah selatan Kabupaten Bogor yang sempat terjadi pada 28-29 Agustus 2021 lalu.

Sebab, sepanjang akhir pekan kemarin, ada peningkatan jumlah kendaraan di kawasan

Puncak hingga 40 persen atau sekitar 38 ribu kendaraan.

Di sisi lain, Bupati Bogor, Ade Yasin menyampaikan jika selama uji coba ganjil genap terbukti ampuh mengurangi kepadatan kendaraan, maka akan dibuatkan payung hukum untuk perkuatan dalam jangka panjang.

"Kita uji coba dulu. Kita lihat respon masyarakat, kalau mengarah pada perbaikan kita akan minta payung hukumnya. Uji coba juga sambil sosialisasi," ujarnya.

Lebih lanjut, selain ganjil genap, Ade menegaskan bahwa bahwa setiap pengendara yang hendak menuju Kawasan Puncak juga wajib menunjukkan bukti mereka sudah divaksin. ● gio

Pemkab Bogor Luncurkan SIGADIS

CIBINONG (IM) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor meluncurkan Sistem Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak Berbasis Masyarakat atau SIGADIS. Sistem ini merupakan langkah strategis Pemkab Bogor melalui Dinas Pemberdayaan, Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) dalam percepatan perlindungan perempuan dan anak.

"Sistem ini adalah sistem pelaporan tindak kekerasan yang menerima perempuan dan anak secara online, melalui layanan aplikasi atau website," ujar Bupati Bogor, Ade Munawaroh Yasin, kemarin.

Ade Yasin melanjutkan, Pemkab Bogor melalui DP3AP2KB melakukan strategi percepatan perlindungan perempuan dan anak, berupa penyusunan Peraturan Bupati Bogor tentang Strategi Percepatan Perlindungan Perempuan dan Anak melalui Aplikasi SIGADIS. Serta pem-

entukan lima Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) SIGADIS pada lima UPT sebagai pilot project.

Di samping itu, Ade Yasin berpesan, jangan sampai sistem ini aktif hanya satu dua bulan saja, tapi selanjutnya tidak terurus. Menurutnya, jangan sampai website atau aplikasi ini tidak berfungsi ketika ada yang betul-betul membutuhkan pertolongan.

"Kalau kita sudah membuka sistem layanan, kita harus konsisten untuk mengurus sistem tersebut, dijaga agar korban yang melapor segera ditindaklanjuti," tegasnya.

Dia menambahkan, nantinya Satgas PPA jangan segala masukan persoalan kekerasan anak, tapi juga menjadi Satgas pendidikan anak.

Misalkan ada satu keluarga yang di dalamnya ada usia anak sekolah, apakah sekolahnya berjalan dengan baik, jika tidak dicari solusinya agar anak tersebut bisa sekolah. ● gio

PPDB, Wagub Jabar Terima Masukan Ombudsman RI

BANDUNG (IM) - Wakil Gubernur Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum menerima saran dan masukan dari Ombudsman RI terkait penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2021/2022 baik tingkat SMA/SMK/SLB yang di bawah kewenangan provinsi maupun SD/SMP di bawah kabupaten/kota.

Menurut Wagub, Pemda Provinsi Jabar segera menindaklanjuti dan mengevaluasi masukan Ombudsman yang bersumber dari pengaduan masyarakat.

"Tadi Kepala Ombudsman menyampaikan tentang sekian ratus masukan dan sudah ditindaklanjuti. Insha Allah kami catat dan evaluasi untuk segera ditindaklanjuti. Kami akan rapatkan dan kami akan lakukan perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik," ujar Uu Ruzhanul Ulum saat pertemuan virtual di Rumah Singgah Wakil Gubernur, Kamis (2/9).

Dalam situasi pandemi tidak mudah menyelenggarakan penerimaan siswa baru karena banyak pembatasan aktivitas dan pertemuan langsung, sehingga komunikasinya terutama dengan orang tua siswa lebih menantang.

Uu mengatakan, hasil dari evaluasi diharapkan menghasilkan

point-point perbaikan dan mengurangi masalah pada PPDB tahun ajaran selanjutnya. "Raraoan mah PPDB tahun ayeuna mah langkung hebat, langkung sampurna dibanding PPDB tahun sebelumnya," ujarnya. Evaluasi PPDB selalu dilakukan setiap tahun dan sebagai penyelenggara Pemda Provinsi Jabar menerima segala masukan masyarakat melalui siapapun, sekaligus mendorong kab/kota juga memperbaiki PPDB yang jadi kewenangannya.

Menurut Uu, Jabar bersama 27 kab/kota bersinergi mempersiapkan generasi muda untuk Indonesia Emas 2045 mendatang. "Karena memang kita tahu hanya dengan pendidikan, kesuksesan, kejayaan dan kemajuan Jawa Barat bisa diraih. Kita tahu bahwa jika ingin sukses dunia dan akhirat harus dengan ilmu," katanya.

"Maka ilmu menjadi skala prioritas bagi kami Pemda Provinsi Jawa Barat dan Insha Allah akan linier dengan visi misi kabupaten kota se-Jawa Barat," imbuh Uu.

Oleh karena itu, papar Uu, pemerintah melalui kebijakan-kebijakan baik dalam PPDB proses belajar mengajar serta sarana dan prasarana selalu memberikan perhatian yang penuh bagi sukses pendidikan di Jabar. ● lys